



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Kennedy¹, Nur Azlina², Julita³, dan Suci Nurulita⁴

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Riau, email: Kennedy@lecturer.unri.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Universitas Riau, email: nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Universitas Riau, email: Julita@lecturer.unri.ac.id

⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Riau, email: suci.nurulita@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penyerapan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 35 OPD. Metode yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 150 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: Penyerapan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pencatatan Administrasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Abstract

This research aims to examine the effect of budget planning, quality of human resources, organizational commitment, administrative records, and the government's internal control system on budget absorption. The population in this study was the regional apparatus organization in Bengkalis Regency, which amounted to 35 DPOs. The method used is saturated sampling, with a total sample of 150 respondents. The data analysis method used in this study is SPSS version 23. The results of this study indicate that budget planning, quality of human resources, organizational commitment, administrative records and government internal control systems significantly influence budget absorption.

Keywords: Budget Planning, Quality of Human Resources, Organizational Commitment, Administrative Records, Government Internal Control Systems

1. Pendahuluan

Penyerapan anggaran yang rendah pada pemerintah pusat dan daerah sering menjadi topik utama dibahas oleh para pengamat ekonomi sebagai salah satu indikator kurangnya optimalisasi kinerja Pemerintah yang telah ditargetkan. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal dapat berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat di manfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan menandakan target yang harus dicapai oleh pemerintah, Anggaran sebagai alat pengawasan yaitu mengevaluasi prestasi kerja atas implementasi dan tindakan perbaikan kedepannya, serta anggaran sebagai alat pengendalian untuk mengalokasikan sumber dana publik yang telah disetujui untuk dibelanjakan.

Pada Peraturan No. 214/PMK.02/2017 [14] menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator atas evaluasi kinerja dalam atas aspek implementasi. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Rata-rata setiap bulan-bulan terakhir tahun anggaran terjadi lonjakan pencairan dana dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah. Kecenderungan kenaikan trennya adalah tiga bulan terakhir tahun anggaran meningkat tajam sehingga terkesan agak dipaksakan dalam penyelesaian program kegiatan. Artinya rencana penarikan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah direncanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disetujui oleh menteri keuangan belum terlaksana sesuai perencanaan. Pelaksanaan anggaran pemerintah daerah belum sesuai dengan perencanaan karena proses perencanaan yang kurang realistis ataupun adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah [21].

Masalah rendahnya penyerapan anggaran di trimester pertama dan membengkak di akhir tahun masih terjadi sampai saat ini. Seperti dikutip dari *cakaplah.com* [3], bahwa penyerapan APBN di Provinsi Riau masih menunjukkan terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran. Untuk kendala pelaksanaan anggaran adalah kendala soal kebijakan pemerintah dan manajemen pengelolaan keuangan seperti keterlambatan petunjuk teknis kegiatan dan lainnya. Masalah penyerapan anggaran juga terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Laporan wartawan *tribunbengkalis.com* [18], Muhammad Natsir (2018) menyatakan bahwa realisasi serapan anggaran pada APBD Bengkalis 2018 sejak Januari hingga akhir Juni Bengkalis baru bisa merealisasikan serapan anggaran sebesar 19% dari total APBD Bengkalis dimana sebaiknya realisasi tersebut sudah dapat dilakukan sebesar 50% tetapi pada kenyataannya masih dibawah 50%.

Realisasi serapan anggaran ini hanya realisasi dari belanja pegawai dan biaya operasional pemerintah Bengkalis. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis mengungkapkan penyerapan anggaran yang masih rendah hingga triwulan ke-2 disebabkan karena adanya defisit anggaran sebesar Rp 1,4 Triliun dan belum bisa dikerjakan menunggu rasionalisasi dilakukan. Dikarenakan kekurangan dana untuk merealisasikan anggaran, maka terjadi perlambatan realisasi dan penumpukan realisasi pada triwulan ke-3 dan triwulan ke-4. Pada triwulan ke-4 realisasi sudah meningkat sebesar 71,61% dimana pada triwulan ke-2 realisasi anggaran masih 19% dan pada triwulan ke-3 diketahui sebesar 90,61%. Realisasi belanja operasi Kabupaten Bengkalis selama tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.846.310.915.885,95 atau 89,19% dari nilai anggaran sebesar Rp. 2.070.115.115.118,32. Jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 1,909.161.510.613,43 mengalami penurunan sebesar Rp.62.850.594.727,48 atau 3,29%.

Pada Tahun 2019, Kabupaten Bengkalis kembali mengalami masalah penyerapan anggaran, seperti di kutip melalui *goriau.com* [6], bahwa Per 30 Juni 2019, realisasi fisik kegiatan belanja langsung APBD Kabupaten Bengkalis sebesar 27,94%, sementara keuangan 20,86%. Sedangkan realisasi fisik belanja tidak langsung APBD Kabupaten Bengkalis sebesar 53,35%, sementara keuangan sebesar 47,09%. Total keseluruhan realisasi fisik sebesar 35,35%. Sementara realisasi keuangan sebesar 28,52%. Padahal berdasarkan PMK Nomor 258/PMK.02/2015 [15] menetapkan bahwa sasaran penyerapan suatu anggaran dikatakan baik apabila mampu menyerap minimal 95% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Sebagaimana hasil laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) [4] bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai belanja publik sangat dipengaruhi oleh perencanaan anggaran. Hal ini didukung dengan penelitian Sudasri [17] yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dimana semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintahan maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Faktor kedua setiap organisasi *private* atau *publik* perlu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas. Terlebih lagi dengan adanya regulasi sebagai pedoman dalam bekerja sangat diperlukan kualitas pegawai untuk memahami dan mengambil keputusan [16]. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah komitmen organisasi. Pegawai yang berkomitmen terhadap pencapaian tujuan akan mendukung sepenuhnya nilai dan target yang ingin diperoleh oleh organisasi. Faktor keempat yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pencatatan administrasi. Administrasi melingkupi seluruh rangkaian kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan terakhir faktor kelima yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran Pemerintah secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran bisa didukung dengan adanya pengendalian internal Pemerintah. Penelitian Hindriani [8] menunjukkan SPIP berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran karena jika penerapan SPIP berjalan dengan baik, maka kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran daerah akan akuntabel dan transparan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu penulis tertarik untuk menguji kembali, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri [16]. Perbedaan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pencatatan administrasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan lokasi penelitian. Alasan dipilihnya Kabupaten Bengkalis karena berdasarkan adanya fenomena masalah penyerapan anggaran pada Tahun 2018 dan Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian kembali apakah dengan teori yang sama tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Stakeholders

Pengertian *stakeholders* adalah sekelompok individu yang diidentifikasi dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu [19]. Peran *stakeholder* yaitu para pemangku kepentingan seperti Investor, pemasok, perbankan, para pelanggan/*client*, atau komunitas-komunitas yang memegang peranan penting dalam organisasi. Sebagai *stakeholders* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan mampu melakukan upaya pembangunan secara optimal. Kemajuan suatu daerah dapat dinilai dari peran

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat di daerahnya. Kepentingan rakyat yang dimaksud disini adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tersebut memang merupakan bentuk dari apa yang dibutuhkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali lagi pada rakyat berupa fasilitas umum yang memadai. Pelayanan, Strategi, dan Operasi dalam menghadapi kendala yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab bersama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai *stakeholders* pemerintah daerah. Hal tersebut tergambarkan dalam proses pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang kecil.

2.1.2 Penyerapan Anggaran

Menurut Halim [7] penyerapan anggaran adalah terwujudnya suatu tujuan dan sasaran atas estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Pemerintah belum memiliki aturan baku tentang standar persentase yang masuk dalam kategori keminiman penyerapan APBD. Namun terdapat beberapa daerah yang memiliki fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala OPD bahwa apabila sampai akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun maka pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran [2].

2.1.3 Perencanaan Anggaran

Menurut DJPK [4] perencanaan sebagai pedoman bagi penganggaran yang pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Glennard [5] mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kemampuan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia disebabkan oleh terpecahnya proses perencanaan dan alokasi keuangan karena lemahnya kapasitas perencanaan disemua tingkatan dalam sistem. Pendekatan *top-down* yang diterapkan di tingkat pusat tanpa kejelasan peran dan tanggung jawab, arahan yang tidak tepat dan komunikasi yang buruk menyebabkan ketidakpastian dan menghambat proses perencanaan bagi OPD terkait.

2.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Keterampilan individu juga menjadi nilai tambah bagi seseorang. Kemampuan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas berdasarkan latarbelakang tingkat Pendidikan yang linear sesuai bidangnya, dan mendapatkan bimbingan teknis tenaga kerja secara berkala, serta pengembangan pengalaman yang dimiliki dan kesempatan luas yang diterima. Telah dapat diakui bahwa pegawai yang berpendidikan tinggi dan secara teknis yang berkualitas lebih mudah menerima pembauran dan mampu mentransformasi pengetahuan eksternal [20]. Dalam artian, organisasi dengan pegawai yang memiliki kualitas dan terlatih akan berpeluang merealisasikan tingkat penyerapan anggaran yang lebih baik.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Menurut Luthans [11] komitmen organisasi merupakan bentuk sikap keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, memiliki usaha yang keras sesuai keinginan organisasi tertentu, dan memiliki keyakinan tertentu serta penerimaan nilai atas tujuan organisasi. Jadi, keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemeliharaan seorang pada pekerjaannya yang khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemeliharaan pada organisasi yang mempekerjakan kepatuhan dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

2.1.6 Pencatatan Administrasi

Administrasi merupakan suatu jenis rangkaian kegiatan klerikal, aktifitas pekerjaan, perbuatan, tindakan maupun usaha yang bervariasi dan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kerangka kerja yang sama untuk mewujudkan tercapainya tujuan. Dalam

perkembangannya, administrasi dipandang sebagai profesi dengan sebutan administrator, baik yang bekerja dilingkungan pemerintahan maupun lingkungan swasta [12].

2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut Nurillah [13] merupakan suatu upaya untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. SPIP merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberikan pedoman bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat di implementasikan secara akuntabel dan transparan. Hal-hal pokok yang penting dalam mewujudkan pengendalian yang efektif yaitu adanya perlindungan fisik terhadap harta, adanya pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan, serta adanya *audit trail* yang memadai; dan sumber daya manusia yang optimal.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil laporan DJPK [4] bahwa tinggi rendahnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam membiayai pelayanan publik sangat bergantung pada proses perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan anggaran akan semakin tinggi pula penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu;

H1: Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

2.2.2 Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Fungsi pemerintah sebagai bagian dari SDM dapat dicapai melalui prakteknya dalam kegiatan pemerintah sebagai pengelola dan pelaksana keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, hal ini menyatakan bahwa baik atau buruknya kualitas SDM dapat mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan penyerapan anggaran. Permasalahan SDM berawal dari penugasan sebagai panitia kegiatan tambahan yang menganggap hal tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokok sehari-hari, sehingga kurang optimal dalam melaksanakannya. SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu;

H2: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

2.2.3 Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran

Komitmen organisasi menurut Ivancevich [9] adalah perasaan identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasi. Dengan komitmen yang tinggi akan memungkinkan setiap anggota mengoptimalkan seluruh kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya, sebaliknya kurangnya komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan berat dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu;

H3: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2.2.4 Hubungan Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Administrasi merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan daerah yang disusun dalam sistem pemerintahan [16]. Jika tenaga administrasi dapat menjalankan

tugasnya dengan baik, maka hasil dari proses dalam pencapaian tujuan pun dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu;

H4: Pencatatan Administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

2.2.5 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam meningkatkan penyerapan anggaran supaya mencapai target serapan anggaran pemerintah maka sangat di perlukan sistem pengendalian internal pemerintah karena dengan adanya sistem pengendalian internal dalam pemerintah sangat bermanfaat untuk mengendalikan semua kegiatan atau program yang di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau OPD dan sistem ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan yang harus dilakukan dengan tepat waktu dan mengatasi resiko dalam penyelewengan dana anggaran yang akan terjadi kedepannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu;

H5: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

3. Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 35 OPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel menggunakan *sampling jenuh* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan adalah; 1) Kepala OPD, 2) Pejabat Penatausahaan Keuangan, 3) Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan, 4) Bendahara Pengeluaran OPD. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *personally-administered questionnaires* adalah kuesioner yang diberikan oleh si peneliti sendiri dan diisi secara pribadi oleh responden. Metode analisis pengujian data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *SPSS versi 23*.

3.1 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 mempresentasikan “sangat rendah” dan skala 5 mempresentasikan “sangat tinggi”.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sumber	Butir pernyataan
Penyerapan Anggaran	Tingkat penyerapan anggaran)	Putri (2014)	1,2,3
Perencanaan Anggaran	1. Komprehensif 2. Terperinci 3. Disiplin 4. Fleksibel 5. Prioritas 6. Keterbukaan	Fitria, Syarah (2016)	1,2,3,4,5,6,7, 8
Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap	Moeheriono (2014)	1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10
Komitmen Organisasi	1. <i>Affective commitment</i> 2. <i>Continuance commitment</i> 3. <i>Normative commitment</i>	Mayer dan Allen (2008)	1,2,3

Pencatatan Administrasi	1.	Dokumen Penyusun Anggaran	Julian (2017)	1,2,3,4
	2.	Proses Penyusunan Dokumen		
	3.	Pagu Anggaran		
	4.	Pemahaman Peraturan		
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.	Lingkungan Pengendalian	Nurillah (2014)	1,2,3,4,5,6,7,
	2.	Kegiatan Pengendalian		8,9,10,11,12,
	3.	Informasi dan komunikasi		13,14
	4.	Pemantauan		

Sumber: Data Olahan, 2019

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukur variabel. Statistik deskriptif terdiri dari *mean*, *minimum*, *maximum*, dan standar deviasi.

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyerapan Anggaran	150	1	5	3,85777	1,002111
Perencanaan Anggaran	150	1	5	3,95166	1,000082
Kualitas Sumber Daya Manusia	150	1	5	3,87	0,961448
Komitmen Organisasi	150	1	5	4,0177	0,930102
Pencatatan Administrasi	150	1	5	3,86577	0,992341
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	150	3	5	4,12777	0,630460
Valid N (listwise)	150				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2019

Dari hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata responden menjawab pertanyaan dalam kuesioner berkisar pada poin antara 3 hingga 5. Seluruh variabel menunjukkan penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari standar deviasinya.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil Pengujian hipotesis berdasarkan pengujian analisis regresi berganda pada olahan SPSS 23 terdiri dari nilai koefisien, t-statistik dan p-values. Nilai koefisien menunjukkan besarnya nilai variabel independen ke dependen. Hasil menunjukkan nilai *T-Statistics* lebih tinggi dibandingkan nilai *T-Table*, yang mana pada penelitian ini nilai *T-Table* untuk hipotesis dua arah (*two-tailed*) adalah lebih dari 1,96 berarti hipotesis terdukung. Apabila pengambilan keputusan p-value < 0,05 maka hipotesis diterima dan jika nilai p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ringkasan hasil dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	Koefisien	T Statistics	Tingkat Sign.	Keputusan
-----------	----------	-----------	--------------	---------------	-----------

H₁	PRA -> PYA	0,116	2,176	,032	Berpengaruh
H₂	KSDM -> PYA	0,131	2,311	,023	Berpengaruh
H₃	KO -> PYA	0,157	2,319	,023	Berpengaruh
H₄	PCA -> PYA	0,292	3,109	,003	Berpengaruh
H₅	SPIP -> PYA	0,076	2,943	,004	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan data pada tabel 3, maka hasil regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,569 + 0,116X_1 + 0,131X_2 + 0,157X_3 + 0,292X_4 + 0,076X_5 + e$$

Seluruh variabel yang diolah menunjukkan hasil bahwa seluruh hipotesis diterima.

4.2.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H1 diterima, artinya perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pada dasarnya perencanaan sebagai pedoman dalam proses penganggaran untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Aspek perencanaan yang tidak tepat dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan optimalnya program kegiatan kerja dengan baik, hal tersebut disebabkan tidak sejalannya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan di implementasikan sehingga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya daya serap anggaran [4]. Hasil penelitian ini didukung penelitian Arif [2] yang menemukan bahwa aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik sehingga akan berdampak pada penyerapan anggaran.

4.2.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H2 diterima, artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Faktor utama keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah pegawai yang berpengalaman, terlatih, mampu menangani tugasnya dengan tepat, bertanggungjawab dan mempunyai motivasi. Adanya ketidaktepatan dalam penetapan SDM akan mempengaruhi pengelolaan dan penyerapan anggaran yang tidak baik karena ketidakmampuan SDM sehingga berdampak pada kualitas pelayanan ke publik menjadi kurang optimal. Hasil ini didukung penelitian Sudasri [17] yang menunjukkan bahwa SDM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara, dan prosedur teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

4.2.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H3 diterima, artinya bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Komitmen organisasi adalah suatu tingkat kepatuhan atau keyakinan sejauh mana seorang pegawai memihak dan terlibat dalam suatu organisasi tertentu yang tujuannya memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi, semakin tinggi keterlibatan dan kepatuhan kerja seorang pegawai berarti semakin baik dalam pelaksanaan realisasi atau penyerapan anggaran dalam pemeliharaan untuk organisasinya. Hasil ini didukung pada penelitian Juliani [10] dimana komitmen manajemen berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah. Adanya komitmen yang tinggi akan memungkinkan setiap anggota mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, dan sebaliknya kurangnya komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan berat dilaksanakan.

4.2.4 Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H4 diterima, artinya bahwa pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Peranan fungsi administrasi dalam penyerapan anggaran sangat penting dimulai dari proses penyusunan perencanaan sampai dengan implementasi penyerapan anggaran. Penetapan panitia pengadaan merupakan awal dalam proses administrasi untuk menyerap anggaran, jika penetapan panitia pengadaan terhambat maka seluruh rangkaian kegiatan akan mengalami keterlambatan [1]. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri [16] tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkulu juga memberikan hasil bahwa pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.2.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian di didapatkan bahwa H4 diterima, artinya SPIP berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dengan dijalankannya SPI yang baik dalam pemerintah sangat bermanfaat untuk mengendalikan semua kegiatan atau program yang di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, demikian juga sebaliknya jika tidak dijalankan dengan tepat maka dapat terjadi resiko dalam penyelewengan penyerapan dana anggaran yang akan terjadi kedepannya. Berdasarkan penelitian dari Hindriani [8] hasil penelitian tersebut menunjukkan SPIP berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran karena jika penerapan SPIP memadai, maka kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran daerah akan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPIP tidak berjalan optimal maka fungsi sistem pengendalian itu tidak akan berjalan dengan semestinya sehingga kemungkinan adanya penyelewengan kekuasaan untuk melakukan penyimpangan terhadap anggaran tersebut.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Faktor tersebut yaitu perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pencatatan administrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini memberikan implikasi penting bagi semua OPD untuk menekankan perhatian pada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada OPD di Kabupaten Bengkalis untuk mengambil langkah strategis dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan peraturannya.

Daftar Pustaka

- [1] Anfujatin. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban". 14(1), pp. 1–18. 2016.
- [2] Arif, E. dan A. Halim. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011". Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28. 2013.
- [3] Cakaplah.com. 2019. "Realisasi APBN di Riau Masih 41,9 Persen, Belanja Bansos jadi Biang Kerok". <https://www.cakaplah.com/berita/baca/24654/2018/07/31/realisasi-apbn-di-riau-masih-419-persen-belanja-bansos-jadi-biang-kerok>. Diakses pada: 1 November 2019.
- [4] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), "Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kursus Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia". 2013.
- [5] Glennard, A.H. & T. M. Maina. "Reversing The Trend of Weak Policy Implementation in The Kenyan Health Sector? A Study of Budget Allocation and Spending of Health

- Resources Versus Set Priorities”. *Health Research and System*, 5, 3. BioMed Central. 2007.
- [6] Goriau. Com. 2019. “Per 30 Juni 2019, Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Bengkalis Masih di Bawah 50%”. <https://www.goriau.com/berita/baca/per-30-juni-2019-realisasi-fisik-dan-keuangan-apbd-bengkalis-masih-di-bawah-50.html>. Diakses pada: 1 November 2019.
- [7] Halim, Abdul, “Manajemen Keuangan Sektor”, Salemba Empat, 2014.
- [8] Hindriadi, Nuning. dkk., “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyerapan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)”. Master Thesis, Administrasi Publik., Universitas Brawijaya., Malang, 2012.
- [9] Ivancevich, John M, dkk. “Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jilid 1 & 2”. Jakarta: Erlangga. 2008.
- [10] Juliani, Dian. “Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa”. Skripsi. Yogyakarta: FE UGM. 2014.
- [11] Luthans, Fred. “Organizational Behavior. McGraw-Hill Companies Inc. New York. 2008.
- [12] Mufiz, Ali, “Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara”, Karunika, 2016.
- [13] Nurillah, As Syifa, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2337-3806, 2014.
- [14] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
- [16] Putri, Carlin, Tasya, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, 2014.
- [17] Sudasri, David. “Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran”. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. 2010.
- [18] Tribun Bengkulu. 2018. “Serapan APBD Bengkulu Baru 19 Persen, Realisasi dari Belanja Pegawai dan Biaya Operasional Pemkab”. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/07/05/serapan-apbd-bengkalis-baru-19-persen-realisis-dari-belanja-pegawai-dan-biaya-operasional-pemkab>. Diakses: 1 November 2019.
- [19] Ulum, Ihyaul. “Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- [20] Vega, J. “An Analytical Model of Absorptive Capacity. Paper to be presented at The Druid Summer Conference on Appropriability, Proximity, Routines and Innovation”. Copenhagen: Denmark. 2007.
- [21] Widhiyanto, Wahyu. “Good Governance dalam Pelaksanaan Anggaran”. 2010.